

**STRATEGI PEMBERDAYAAN PERTANIAN BAGI TUNAWISMA
DI BALAI REHABILITASI SOSIAL “SAMEKTO KARTI” PEMALANG I****Qory Amalia, Rasdi Eko Siswoyo, S. Edy Mulyono** ✉Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang,
Indonesia**Info Artikel***Sejarah Artikel:*Diterima Januari 2013
Disetujui Februari 2013
Dipublikasikan Maret
2013*Keywords:**Homelessness,
Empowerment Strategy,
Agriculture, Pemalang***Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi pada kenyataan semakin kompleksnya masalah kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Proses pemberdayaan pertanian menentukan pada kemandirian masyarakat sebagai hasil dan menunjukkan pada kemampuan orang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Subyek penelitian terdiri dari 1 Kepala BAREHSOS, 1 Pekerja Sosial, dan 5 Tunawisma. Teknik Penganalisisan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1) Pengumpulan data, 2) Reduksi data, 3) Penyajian data, 4) Penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini: (1) Pemberdayaan dilaksanakan dengan bimbingan dari tutor-tutor atau pendamping yang sesuai dengan bidangnya. Selain itu juga adanya kerjasama dengan instansi lain seperti BPP (Balai Penyuluh Pertanian) dan PPL (Petugas Pertanian Lapangan) yang mendukung berjalannya proses pemberdayaan pertanian dengan memberikan penyuluhan setiap minggu sekali secara rutin. (2) Strategi pemberdayaan pertanian di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I antara lain: (a) pada aras mikro yaitu dengan cara melakukan kerja sama dengan instansi-instansi, seperti BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Ampelgading (b) pada aras mezo dengan cara pendidikan pemberdayaan, dinamika kelompok, dan memecahkan masalah pemberdayaan, (c) pada aras makro dengan cara perencanaan pemberdayaan, merumuskan pemberdayaan, dan pengorganisasian. (3) Kendala dalam pemberdayaan pertanian di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I diantaranya adalah fasilitas atau sarana dan prasarana yang masih sangat sederhana dan masih kurang lengkap. Kendala yang lain adalah mental dari penerima manfaat yang masih kurang baik. Saran yang disampaikan yaitu: 1) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pemberdayaan pertanian. 2) Proses pemberdayaan yang dilaksanakan benar-benar mampu mengantarkan para penerima manfaat untuk kembali ke masyarakat dengan hidup secara mandiri. 3) Pengoptimalan setelah selesainya pemberdayaan yaitu adanya pemantauan terhadap para penerima manfaat agar tidak kembali ke jalan dan kembali menjadi tuawisma. 4) Adanya jaminan kepada para penerima manfaat setelah selesainya proses pemberdayaan yaitu berupa pekerjaan ataupun disalurkan sebagai tenaga kerja sesuai dengan kemampuan masing-masing penerima manfaat.

Abstract

The research is motivated in fact the more complex issues of social welfare for the people. The process of determining the independence of community empowerment as a result and shows the ability of people to meet their basic needs. This research uses descriptive qualitative method of data collection through interviews and documentation. The study subjects consisted of 1 Chief BAREHSOS, 1 Social Worker, and 5 Homeless. Technique of analyzing the data used in this study include: 1) data collection, 2) data reduction, 3) Presentation of data, 4) Withdrawal conclusions. The results obtained in this study: (1) Empowerment conducted with the guidance of a tutor or co-tutor according to the industry. In addition to the cooperation with other institutions such as BPP (Agricultural Extension Center) and PPL (Agriculture Field Officer) to support passage of the agricultural empowerment by providing counseling once a week on a regular basis. (2) agricultural empowerment strategies in Social Rehabilitation Center “Karti Samekto” Pemalang I, among others: (a) at the level of micro that is by working with agencies such as BPP (Agricultural Extension Center) Ampelgading (b) at the level of mezo by way of educational empowerment, group dynamics, and problem solving empowerment, (c) at the level of macro planning by empowering, formulate empowerment, and organization. (3) Constraints in agricultural empowerment of Social Rehabilitation Center “Karti Samekto” Pemalang I include the facility or infrastructure which is very simple and is still not complete. Another obstacle is mental beneficiaries are still not good. Suggestions presented are: 1) Optimize infrastructure required in the processes of agriculture. 2) The empowerment process undertaken really able to bring the beneficiaries to return to the community to live independently. 3) Optimization after the completion of empowerment that is the monitoring of the beneficiaries not to return to the road and back into tuawisma. 4) Guaranteed to beneficiaries after completion of the process of empowerment in the form of employment or labor supplied as appropriate to the abilities of each of the beneficiaries.

© 2013 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung A2 Lantai 2 FIP Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: qory_amalia@ymail.com

ISSN 2252-6331

PENDAHULUAN

Menurut Wirosardjono (1988:66) gelandangan (tunawisma) adalah fenomena sosial, ekonomi, dan budaya yang dialami oleh sebagian amat kecil penduduk kota besar, sehingga menempatkan mereka pada lapisan sosial paling bawah di masyarakat kota. Walaupun mereka bekerja lebih keras, mempunyai kegiatan tertentu yang teratur, dan pendapatan yang mendukung daya tahan mereka tetap tinggal di kota, tetapi cara hidup, nilai, dan norma kehidupan mereka dianggap menyimpang dari nilai yang diterima masyarakat. Untuk keluar dari tata nilai itu, hambatan utama adalah sub kultur gelandangan/ kesrakatan. Penanganannya tidak hanya melalui pendekatan ekonomi, keamanan, ketertiban, bahkan juga tidak cukup dengan pendekatan pemerintahan. Penanggulangan secara mendasar masalah ini harus dari pendekatan kemanusiaan, psikologis, dan sosial, serta menyeluruh.

Karakteristik yang paling menonjol dalam pribadi tunawisma adalah kondisi objektifnya sendiri. Mereka ini umumnya hidup dalam kesengsaraan, kemelaratan, kesedihan dan keputusasaan. Kemiskinan material ataupun spiritual adalah ciri lain yang menonjol dalam kehidupan tunawisma kita, disamping merangkap relatif miskin pendidikan. Buta aksara, buta angka dan buta huruf adalah milik utama mereka. Dan yang lebih mengherankan lagi ternyata keadaan seperti ini sudah bukan merupakan barang yang perlu dirisaukan oleh mereka. Bukankah penderitaan sudah menyatu dalam hati nuraninya. Akan tetapi pastilah hal ini merupakan persoalan yang sangat simpatik untuk direnungkan. Jika kita memperhatikan pola hidup, keadaan sosial ekonomiserta bukti-bukti yang menyatakan bahwa tunawisma merupakan kelompok warga negara yang perlu ditingkatkan taraf hidupnya kiranya jelas bukan apapun yang aneh atau bertele-tele bahwa nasib tunawisma perlu diubah. Tunawisma haruslah mampu berperan selaku pejuang pembangunan (Sastratmadja, 1991: 23).

Strategi pembangunan sosial adalah strategi yang berorientasi kesejahteraan dan menjanjikan pelayanan sosial yang dapat diterima oleh warga masyarakat. Agar strategi pembangunan sosial ini dapat mengangkat masyarakat khususnya lapisan masyarakat yang paling membutuhkan pelayanan sosial, maka perlu dilakukan implementasi atas berbagai karakteristiknya ke dalam berbagai bentuk program pelayanan sosial (Soetomo, 2008: 337)

Usaha pengelolaan masalah kesejahteraan sosial oleh pemerintah maupun negara, adalah memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial yang layak yang diatur dengan undang-undang.

Sesuai dengan undang-undang tentang penanganan fakir miskin bab 1. Ketentuan umum pasal 1 ; 1) Fakir miskin adalah orang sama sekali tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ keluarganya. 2) Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan / masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap negara. 3) Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/ pelayanan sosial (Tunggal, 2012: 2)

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non formal perlu mendapat prioritas. Memberdayakan masyarakat bertujuan “mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri” atau “membantu

masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri". Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan masyarakat, adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan. (Sutarto, 2007: 153)

Memberdayakan masyarakat dengan hanya memberikan bantuan uang bukanlah segalanya. Banyak proyek-proyek Inpres yang tekanannya memberikan bantuan material kepada masyarakat desa justru mematikan swadaya masyarakat, bahkan sebaliknya menjadikan masyarakat menggantungkan diri kepada pemberi bantuan, sehingga prinsip pemberian bantuan kepada masyarakat polanya harus dirubah "jangan diberikan ikan tapi berilah kail". Pola pemberdayaan dengan hanya memberikan bantuan uang atau bantuan proyek kepada masyarakat desa tidak akan merangsang peran serta masyarakat untuk terlibat di dalam pembangunan. (Sutarto, 2007: 155)

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memiliki 27 Balai Rehabilitasi Sosial yang tersebar di masing-masing Kabupaten sebagai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) pada Dinas Sosial provinsi Jateng sesuai peraturan pemerintah Nomor 111 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah telah membentuk Panti Sosial yang sekarang digantikan dengan Balai Rehabilitasi Sosial.

Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti" Pemalang I dan Balai Rehabilitasi Sosial "Distrarastra" Pemalang II adalah Balai Rehabilitasi yang ada di Kabupaten Pemalang yang mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam penangan *kelayan*, di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang I menangani mereka pada *kelayan* tuna laras seperti Gelandangan, Pengemis, PGOT, wanita tuna susila (WTS) dan *eks psikotik* sedangkan di Balai Rehabilitasi Sosial "Distrarastra" Pemalang II menangani mereka para kelayan dari Sekolah Luar Biasa (SLB) seperti tuna daksa, tuna wicara, tuna netra, tuna rungu dan tuna grahita. Salah satu Program pemberdayaan yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial

"Samekto Karti" Pemalang I yaitu berupa keterampilan pertanian.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif yaitu menggunakan pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Subyek dalam penelitian ini adalah lima orang tunawisma di Balai Rehabilitasi samekto Karti Pemalang I dan informan atau narasumber yaitu dua orang pekerja sosial yang membina kelayan di Balai rehabilitasi sosial samekto Karti Pemalang I. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti" Pemalang I yang beralamatkan Jl. Raya Pabrik Comal Baru, Ujunggede, Ampelgading, Pemalang.

Fokus penelitian yang dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang I ini adalah strategi pemberdayaan pertanian bagi tunawisma di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang I beserta kendala-kendala yang muncul pada proses pemberdayaan pertanian di Balai Rehabilitasi sosial Samekto Karti Pemalang I.

Sumber informasi utama adalah lima orang Tunawisma di Balai rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang I guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan strategi pemberdayaan pertanian yang sedang berlangsung. Selain informasi utama peneliti juga menggunakan sumber dari pihak lain yaitu dua pekerja sosial Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang I atau pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pemberdayaan pertanian tersebut

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Peneliti yang menggunakan jenis wawancara ini bertujuan mencari jawaban

terhadap hipotesis kerja. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun dengan rapi dan ketat. Sedangkan wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda dengan wawancara terstruktur. Cirinya kurang diinterupsi dan arbitrer. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Hasil wawancara semacam ini menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal.

Metode dokumentasi dilakukan di mana peneliti melakukan pencatatan terhadap data-data yang ada di Balai rehabilitasi samekto Karti Peralang I dengan melihat data-ata, informasi dan informan, dan berupa gambar atau foto yang didapat saat melakukan observasi, rekaman saat wawancara. Data-data yang didapatkan dapat digunakan untuk memperkuat apa yang terdapat di lapangan saat wawancara atau observasi.

Peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yang berkaitan dengan aktivitas pemberdayaan pertanian bagi Tunawisma di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Peralang I.

Simpulan akhir dalam proses analisis kualitatif tidak akan ditarik kecuali setelah proses pengumpulan data berakhir. Simpulan yang ditarik perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih cepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pemberdayaan Pertanian bagi Tunawisma

Pemberdayaan pertanian adalah sebuah proses atau tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan pertanian adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan pertanian menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh

sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyongkong dan Pemeliharaan (Suharto, 2009:67)

- 1) *Pemungkinan* menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- 2) *Pengamatan* memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- 3) *Perlindungan* melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak terlindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 4) *Penyongkongan* memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyongkong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

- 5) *Pemeliharaan* memelihara kondisi yang kondusif agar tetap menjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Hasil temuan terkait dengan proses kegiatan pemberdayaan pertanian bagi Tunawisma di Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti" yaitu: pemberdayaan pertanian merupakan suatu cara untuk mengatasi kemiskinan, melalui pemberdayaan pertanian bagi penerima manfaat dapat memperoleh keterampilan kehidupan di Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti" Pemalang I. Pada intinya proses pemberdayaan pertanian menentukan pada kemandirian masyarakat sebagai hasil, pemberdayaan pertanian menunjukkan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dengan bercocok tanam sehingga mereka memiliki penghasilan dari hasil panen yang bisa dijual sebagai penghasilan tambahan.

Dari hasil penelitian pemberdayaan pertanian bagi Tunawisma (penerima manfaat) di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang I berjalan dan dilaksanakan dengan bimbingan dari tutor-tutor atau pendamping yang sesuai dengan bidangnya. Adapun pertanian yang dilaksanakan yaitu, penanaman palawija dan sayur mayur seperti jagung, kacang tanah, sawi, bayam, kangkung, dan juga budi daya lele. Proses pertanian dilakukan oleh para penerima manfaat yang didampingi oleh pendamping yang bertugas dan hasil panen yang didapatkan kemudian dijual sehingga bisa menjadi penghasilan tambahan bagi para Tunawisma. Selain itu juga adanya kerjasama dengan instansi lain seperti BPP (Balai Penyuluh Pertanian) dan PPL (Petugas Pertanian Lapangan) yang mendukung berjalannya proses pemberdayaan pertanian dengan memberikan penyuluhan setiap seminggu sekali secara rutin.

2. Strategi Pemberdayaan Pertanian Bagi Tunawisma

Pada dasarnya strategi pemberdayaan pertanian adalah cara dalam melaksanakan proses pemberdayaan pertanian, strategi-strategi di atas memiliki tujuan akhir adanya kemandirian pada klien. Strategi pemberdayaan pertanian di Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti" Pemalang I memiliki strategi yang digunakan dalam pemberdayaan pertanian bagi Tunawisma yaitu dengan memberikan berbagai bimbingan pemberdayaan pertanian, pendidikan pemberdayaan pertanian, pelatihan pemberdayaan pertanian, dinamika kelompok, memecahkan masalah pemberdayaan pertanian, dan yang paling penting yaitu praktik secara langsung dengan bercocok tanam berbagai macam palawija dan sayur mayur. Hasil dari panen palawija kemudian dijual dan dibagi hasilnya antara penerima manfaat dan petugas BAREHSOS yang pastinya hasil tersebut bisa dijadikan penghasilan tambahan bagi para Tunawisma.

Menurut Suharto (2009: 66-67) pemberdayaan pertanian dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment*): mikro, mezzo, dan makro.

1) Aras mikro

Pemberdayaan pertanian dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas kehidupannya. Bimbingan yang diberikan yaitu mulai dari pemilihan bibit yang baik, penanaman, pemeliharaan, pemupukan, pemberantasan hama, pemanenan, paska panen, sampai pemasaran. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

2) Aras mezzo

Pemberdayaan pertanian dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan pertanian dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai

strategi dalam peningkatan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan pertanian yang dihadapi. Dinamika kelompok dalam pemberdayaan pertanian berlangsung mulai dari pemilihan bibit yang baik, penanaman, pemeliharaan, pemupukan, pemberantasan hama, pemanenan, paska panen, sampai dengan pemasaran dinamika kelompok masih bisa terlihat.

3) Aras makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, rencana sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. Kebebasan memilih ini dapat dilihat dari dengan adanya pemberian kebebasan untuk memilih bagi para penerima manfaat untuk memilih pemberdayaan pertanian yang akan diikutinya, seperti pertanian jagung, kacang tanah, bayam, kangkung, sawi maupun budidaya lele.

Hasil temuan terkait dengan adanya bimbingan pemberdayaan pertanian dari BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Ampelgading di Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti" Pematang I yaitu: memberikan dukungan dan bimbingan adalah hal yang penting dalam pelaksanaan pemberdayaan pertanian sehingga penerima manfaat dapat menjalankan perannya dalam kegiatan pemberdayaan pertanian. Bimbingan pemberdayaan pertanian yang dilaksanakan adalah antara petugas Balai Rehsos dan para penerima manfaat saling bekerjasama, saling berpendapat dalam menyusun, merencanakan, menentukan pemberdayaan pertanian apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan

kebutuhan serta keinginan para penerima manfaat. Bimbingan pemberdayaan pertanian tersebut dapat dipahami dalam kajian konseptual sebagaimana yang disajikan.

Suatu pemberdayaan pertanian akan berjalan dengan baik jika adanya suatu dukungan dari pihak lain, yang kemudian keduanya bekerjasama dalam menentukan pemberdayaan pertanian yang tepat bagi penerima manfaat dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para penerima manfaat. Suharto dalam Prihantoro (2012: 76) berpendapat bahwa memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menolong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Friedman dalam Prihantoro (2012; 76) berpendapat bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu mendorong (*encourage*) memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awaranness*) akan potensi yang dimiliki masyarakat miskin.

3. Kendala Pemberdayaan Pertanian

Kendala dalam pemberdayaan pertanian di Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti" Pematang I dari hasil penelitian dan wawancara dengan Kasi Pelayanan dan Resos menerangkan masih ada kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan, yaitu fasilitas atau sarana dan prasarana yang masih sangat sederhana dan masih kurang lengkap. Selain itu masih ada kendala lain yaitu mental dari penerima manfaat yang masih kurang baik terbukti dengan adanya penerima manfaat yang tidak jujur dalam pelaksanaan pemberdayaan dengan menjual hasil pertanian tanpa melapor kepada pihak pegawai balai REHSOS. Kendala lainnya yaitu masih ada penerima manfaat yang tidak akur satu sama lain. Sehingga sesekali terjadi pertengkaran, yang akhirnya akan dipanggil oleh pegawai untuk diberi motivasi agar ke depannya tidak mengulangi perbuatan yang kurang terpuji itu.

4. Cara Mengatasi Kendala yang Dihadapi

Melalui proses pembelajaran pemberdayaan pertanian maka penerima manfaat diajak untuk menemukan dan mencari masalah-masalah sosial yang ada. Penerima manfaat juga harus bisa menyelesaikan permasalahannya dengan cara mengetahui potensi-potensi yang dimiliki melalui pemberdayaan pertanian yang dilaksanakan. Menurut Conway dalam Prihantoro (2012: 82) bahwa tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok yang lemah memiliki ketiakberdayaan dan mampu mengatasi masalah dalam dirinya, baik karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri) agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya, maupun karena kondisi eksternal (itindas oleh struktur sosial yang tidak adil).

Dari hasil penelitian permasalahan pemberdayaan pertanian di Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti" Pemalang I diantaranya adalah masih ada penerima manfaat yang kurang bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan pemberdayaan dan malas melaksanakan praktik dengan bercocok tanam dari awal menanam hingga pada akhirnya panaan. Pemecahan masalahnya yaitu diidentifikasi kemudian dipanggil penerima manfaat yang bermasalah untuk kemudian diberi motivasi dan penjelasan-penjelasan mengenai pentingnya pemberdayaan.

SIMPULAN

Proses kegiatan pemberdayaan pertanian bagi Tunawisma di Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti" yaitu pertanian palawija dan sayur mayur, diantaranya penanam jagung, penanaman kacang tanah, penanaman sawi, penanaman bayam dan juga budi daya lele.

Strategi pemberdayaan pertanian di Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti" Pemalang I antara lain: (1) pada aras mikro yaitu dengan cara melakukan kerja sama dengan instansi-instansi seperti, BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Ampelgading (2) pada aras mezzo dengan cara pendidikan pemberdayaan, dinamika kelompok, dan memecahkan masalah pemberdayaan, (3) pada aras makro dengan cara perencanaan

pemberdayaan, merumuskan pemberdayaan, dan pengorganisasian.

Kendala dalam pemberdayaan pertanian di Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti" Pemalang I yaitu fasilitas atau sarana dan prasarana pertanian yang masih sangat sederhana dan masih kurang lengkap. Kendala yang lain adalah mental dari penerima manfaat yang masih kurang baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Dosen Pembimbing dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya artikel ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Prihantoro, Satya. 2012. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Meningkatkan Pendapatan (Studi Empiris di Kelurahan Bandung Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo)*. Semarang: UNNES
- Sastraatmadha, Entang. 1991. *Dampak Sosial Pembangunan*. Bandung: Angkasa
- Soetomo. 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Jogjakarta: Pustaka Utama
- Sutarto, Joko. 2007. *Pendidikan Nonformal Konsep Dasar Proses Pembelajaran, dan Pemberdayaan Masyarakat*. Semarang: Unnes Press
- Tunggal, Hadi Setia. 2012. *Undang-undang fakir miskin (undang-undang nomor 13/2011) dan peraturan ketenagakerjaan 2011*. Jakarta: harvarindo
- Wirosardjono, Soetjipto. 1988. *Gelandangan dan Pilihan Kebijakan Penanggulangan*. Jakarta: LP3E